

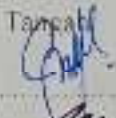
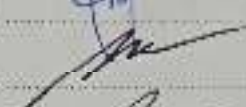



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Panitia Ujian Akhir Meja Hijau Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No 11920/SK/BAN-PT/AK-PT/SON/2021, tanggal 26 Oktober 2021, dengan ini menyatakan bahwa:

NAMA : AKTA JOICE NAPTUPULU
NPM : 20530029
PROG. STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN


Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif Sajana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) pada Hari Selasa, 27 Agustus 2024 dinyatakan LULUS.

Panitia Ujian,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si	1. 
2. Sekretaris	Martin Luter Purba, S.E., M.Si	2. 
3. Penguji Utama	Martin Luter Purba, S.E., M.Si	3. 
4. Anggota Penguji	Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si	4. 
5. Pembela	Elvis F Purba, S.E., M.Si	5. 



Dekan


(Dr. L. Hamonangan Sihombing, S.E., M.Si)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari setiap negara, dan Indonesia diberkahi dengan berbagai sumber daya alam. Lokasi geografis Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan keuntungan yang unik. Namun, sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata di seluruh wilayah, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan bagian lain di dunia.

Pada setiap daerah di Indonesia mempunyai keunggulan sumber daya alam yang memiliki perbedaan dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, agar perekonomian Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih baik, setiap daerah perlu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kesenjangan mengarah pada atau perbedaan yang signifikan dalam perkembangan ekonomi, distribusi pendapatan, dan akses terhadap sumber daya antar berbagai wilayah atau kelompok di berbagai negara.

Proses multidimensi yang melingkupi transformasi termasuk struktur social kehidupan masyarakat dan instansi nasional disebut pembangunan. Pembangunan juga mencakup pembaruan dalam tahap perkembangan ekonomi, penurunan kesenjangan pendapatan, dan penurunan kemiskinan.. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap menjadi tugas yang diutamakan sehingga harus dilaksanakan agar mencapai pendapatan yang maksimal.

Dalam pembangunan ekonomi, perdebatan selalu muncul ketika menentukan strategi dasar pembangunan, terutama mengenai apakah akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan dengan berkeadilan adalah bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun tidak dibarengi dengan Penyerataan, bahkan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat mengakibatkan keresahan dan ketengangan politik. Dengan tingginya suatu ekonomi daerah tidak menjamin akan pemerataan pendapatan.

Mengingat kesetaraan merupakan kebutuhan pembangunan yang efektif dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, Kuncoro (2003) berpendapat bahwa proses ekspansi ekonomi yang cepat dapat berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan produksi per kapita dalam jangka waktu yang lama. Pembangunan ekonomi menurut Arsyad (2010) adalah studi tentang hubungan antara unsur-unsur nasional dan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita aktual suatu negara secara stabil. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan.

Saat ini, pemerintahan sedang bekerja keras untuk melakukan pembangunan melalui program inisiatif yang termasuk dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, yang sudah atau yang berlangsung atau yang akan dilaksanakan, dan biasanya menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Sarina

(2019) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan pembangunan pemerataan ekonomi.

Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pemerataan, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pembangunan perekonomian daerah pada dasarnya mengalami peningkatan, perluasan, dan penyempurnaan.. Tujuan pemerataan ekonomi adalah untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan disparitas pendapatan.

Pendapatan per kapita penduduk pada akhirnya meningkat sebagai akibat dari kemajuan ekonomi di setiap lokasi. Selain memodernisasi masyarakat, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup setiap orang sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat darinya. Inilah mengapa ini sangat penting.

Ketika perekonomian suatu negara tumbuh pesat dan kesenjangan pendapatan atau bisa disebut dengan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah kecil, maka perekonomian akan terdistribusi secara merata. Sebaliknya, jika ekonomi suatu negara tumbuh dengan cepat namun gagal mencapai pemerataan ekonomi, maka ketimpangan pendapatan akan muncul dan memengaruhi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan pemerataan pendapatan di seluruh negara. Jika tidak ada pemerataan ekonomi setelah pertumbuhan ekonomi tinggi, jadi akan terjadi kesenjangan pendapatan

Pada kemampuan daerah, keadaan demografis dan ketenagakerjaan, dan kondisi sosial budaya adalah penyebab disparitas pendapatan antar daerah. Hal ini mendorong pengembangan wilayah tertentu dan memusatkan kegiatan ekonomi di

beberapa wilayah yang kaya akan sumber daya alam, menciptakan wilayah yang maju dan terbelakang, serta merusak pemerataan pembangunan ekonomi.

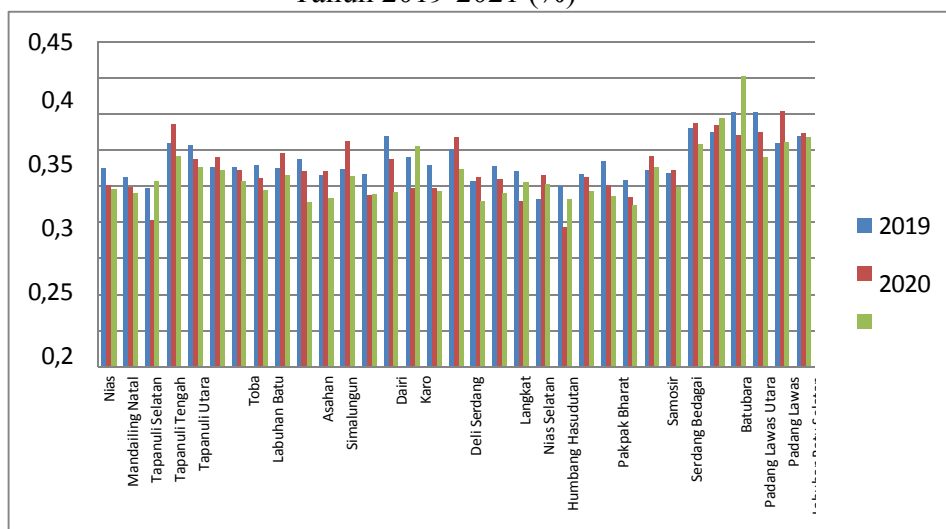
Hingga saat ini, Indonesia belum berhasil menyelesaikan permasalahan terkait disparitas, termasuk di Provinsi Sumatra Utara. Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 33 kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita yang tidak merata. Beberapa wilayah memiliki objek wisata yang menarik, dan mereka dapat berkembang menjadi pusat perekonomian lokal.

Pemerintah harus memprioritaskan potensi saat membangun daerah agar setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan daerah, mengurangi disparitas pendapatan di

Sumatera Utara. Dengan usaha pembangunan yang tepat sasaran, disparitas pendapatan dapat dikurangi. Gini ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa tidak merata distribusi pendapatan, dapat digunakan untuk menghitung disparitas pendapatan. Disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 ditunjukkan pada Grafik 1.1

Grafik 1.1

Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara Tahun 2019-2021 (%)

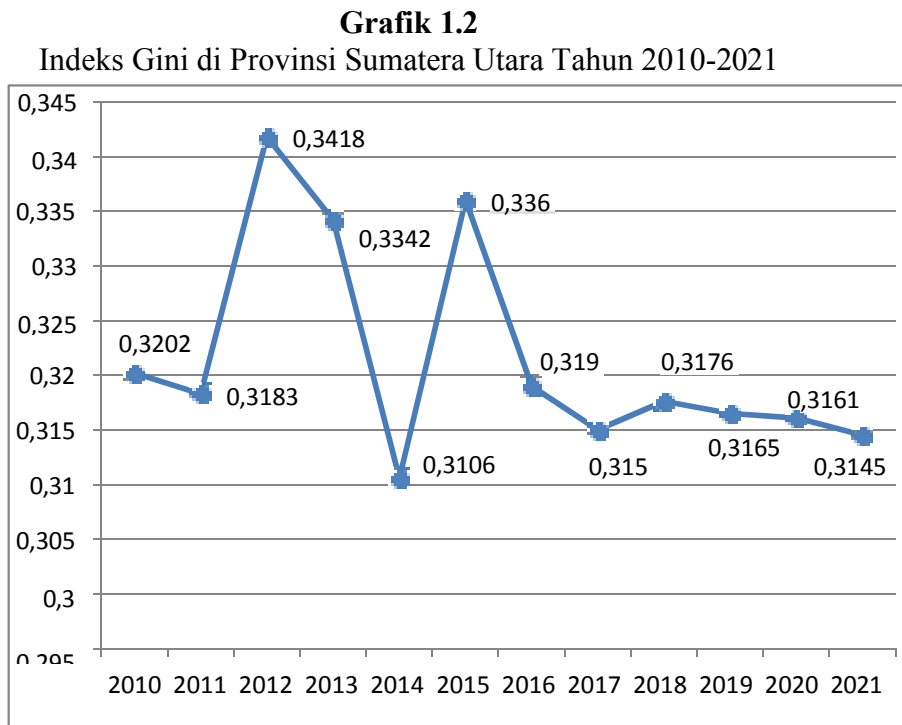


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 1.1 bahwa Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami kenaikan yang tinggi. Pada tahun 2020 mengalami ketimpangan sebesar 0,3161 yang artinya termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan begitu juga pada tahun 2021 ketimpangan sebesar 0,3145 . Pada tahun 2019 tingkat angka ketimpangan terjadi di Kota Medan sebesar 0,3519 yang termasuk kategori ketimpangan sedang dan angka ketimpangan yang ada pada Kabupaten Padang Lawas sebesar 0,2313 termasuk dalam kategori ketimpangan relatif merata. Pada tahun 2020 angka ketimpangan tertinggi ialah 0,3538 yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dan angka ketimpangan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan 0,1935 ialah termasuk dalam kategori

ketimpangan lebih tidak merata. Tahun 2021 angka ketimpangan pada Kabupaten Gunung sitoli sebesar 0,3166 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dan angka ketimpangan pada Kabupaten Dairi sebesar 0,2268 ialah termasuk dalam kategori. ketimpangan merata sempurna. Beberapa wilayah memiliki indeks Gini ratio yang tinggi. Beberapa di antaranya adalah ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan, dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Indeks Gini adalah adalah ukuran tingkat ketimpangan pendapatan, dihitung sebagai rasio antara 0 dan 1. Koefisien Gini kurang dari 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, antara 0,4 dan 0,5 sebagai ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 sebagai ketimpangan tinggi. Grafik 1.2 menunjukkan tingkat ketimpangan dalam angka koefisien Gini untuk provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Utara

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa koefisien Gini untuk Sumatera Utara antara tahun 2010 dan 2011 menunjukkan perubahan yang signifikan, meningkat menjadi 0,3202 pada tahun 2010 namun menurun menjadi 0,3183 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, angka ini meningkat menjadi 0,3418, namun pada tahun 2013, angka ini kembali menurun menjadi 0,3342. Pada tahun 2015 menurun tajam menjadi 0,3106, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,3190, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 0,3150. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,3176, namun pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,3165. Pada tahun 2020, indeks gini terus mengalami penurunan menjadi 0,3161, dan pada tahun 2021, terjadi perubahan menjadi 0,3145. Pada tahun 2021, ketimpangan tergolong rendah, yang merupakan dampak dari rendahnya ketimpangan pengeluaran masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Daerah yang terbelakang akan dimotivasi untuk menaikkan kadar hidup mereka supaya mereka tidak jauh tertinggal dengan wilayah setempat. Disparitas juga akan menguntungkan karena daerah bersaing untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Koefisien Gini adalah metrik yang mengukur ketimpangan agregat dengan angka yang berkisar antara nol dan satu merupakan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan.

Ketika negara berkembang dan miskin berusaha untuk mengembangkan ekonomi mereka, disparitas pendapatan telah menjadi masalah. Hal ini terjadi ketika pendapatan tidak merata dan dapat dilihat dari tingkat pembangunan di suatu wilayah. Hal ini terkait dengan tindakan pemerintah yang kurang memanfaatkan hak milik di daerah yang memiliki potensi sumber daya yang kaya.

Akibat disparitas potensi antarwilayah, kemajuan perekonomian tidak selalu merata, sehingga kesenjangan pendapatan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Pertumbuhan

ekonomi tidak terdistribusi secara merata, dimana beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang pesat sementara wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi masih belum dapat menyelesaikan masalah ini. Hasil dari pernyataan di atas adalah bahwa disparitas pendapatan harus segera diperbaiki. Meskipun pembangunan yang adil merupakan tanggung jawab pemerintah di tempat-tempat yang memerlukan pembangunan infrastruktur untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kebutuhan lokal, pembangunan ekonomi berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menghentikan penurunan pendapatan.

Peningkatan disparitas pendapatan seiring dengan peningkatan IPM dapat disebabkan oleh fakta bahwa fasilitas-fasilitas yang mendukung IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masih terkonsentrasi di perkotaan. Pembelajaran dan karena peningkatan tenaga kerja dan kemampuan untuk meningkatkannya pendapatan per kapita, kesehatan yang baik dapat mengurangi disparitas pendapatan. Namun, hal ini hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti pusat-pusat ekonomi atau daerah-daerah berpendapatan tinggi, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kesenjangan pendapatan antar wilayah. Menurut, Becker (2007), IPM berpengaruh negatif terhadap disparitas, dan menurut dan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan pendidikan formal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Faktanya, penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sehingga tingkat kemiskinan terus meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur, fasilitas umum, dan aksesibilitas di daerah pedesaan, sehingga masyarakat setempat tidak mendapatkan pendidikan, informasi, dan layanan publik lainnya seperti kesehatan, serta sumber

daya manusia yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Masalah-masalah ini membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, sehingga pemerataan pembangunan harus segera dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Ada hubungan antara disparitas pendapatan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Disparitas pendapatan mengacu pada kesenjangan antara pendapatan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan sumber-sumber lainnya. Semua ini disebut sebagai pendapatan asli daerah. Menurut Dwi Sudi (2013) peran PAD sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan bagi pemerintah daerah menjadi penting sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas

Pendapatan Provinsi Sumatra Utara dari tahun 2010 hingga 2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor- faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti lain untuk mengembangkan studi ketimpangan pendapatan untuk mengurangi besarnya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Disparitas Pendapatan

2.1.1 Pengertian Disparitas Pendapatan

Dalam proses pembangunan ekonomi, terdapat kesenjangan pendapatan antar daerah dalam hal pembangunan regional dan nasional. Untuk menciptakan daerah maju dan daerah tertinggal yang berdampak pada kesejahteraan dan ketidakpuasan masyarakat, kesenjangan tersebut merupakan akibat dari perbandingan keadaan demografi dan sumber daya alam di masing-masing lokasi (Sjafrizal, 2012). Ketidakmerataan akan mengakibatkan adanya perbedaan tingkat pembangunan, yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2004), Standar hidup dalam suatu masyarakat bergantung pada ketidaksetaraan, karena perbedaan faktor produksi dan sumber daya di berbagai wilayah menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan, yang pada gilirannya menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antar wilayah..

Untuk tujuan kuantitatif dan analisis, distribusi pendapatan dibagi menjadi dua dimensi utama yaitu (Todaro, 2000):

1. Pendapatan “individu”, yaitu distribusi pendapatan menurut besarnya pendapatan, digunakan oleh para ekonom. Distribusi ini tidak memperhitungkan tingkat pendapatan individu atau total pendapatan per orang atau rumah tangga. Tidak peduli berapa banyak pendapatan yang dimiliki setiap orang, baik dari pekerjaan dan lain-lain. Beragam macam penghasilan yang berkaitan dengan lokasi (pedesaan atau perkotaan) dan jenis pekerjaan terabaikan.
2. Distribusi pendapatan yang "fungsional", atau berdasarkan bagian faktor distribusi

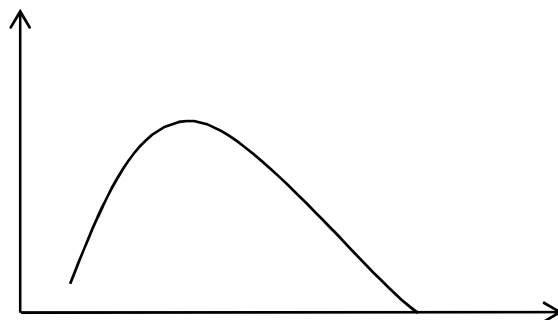
Dalam sistem distribusi ini, individu dianggap sebagai entitas terpisah-pisah.

Kesenjangan penghasilan antar wilayah tergantung pada jumlah penghasilan yang didapat setiap individu di wilayah tersebut, baik dari kelompok masyarakat ataupun dari tempat tertentu di dalam wilayah tersebut. Perbedaan tingkat pendapatan menyebabkan distribusi pendapatan yang berbeda, dan tingkat perbedaan ini menentukan tingkat pemerataan pendapatan di suatu wilayah. Akibatnya, ketimpangan pendapatan bergantung pada jumlah penghasilan yang didapat oleh setiap individu wilayah (Todaro and Smith, 2003).

Menurut teori neo klasik, terdapat korelasi antara disparitas pendapatan daerah dengan kemajuan ekonomi. Hipotesis 'U terbalik' yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1995 menjadi awal munculnya teori ketimpangan pendapatan. Distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata ketika pembangunan dimulai, namun secara bertahap menjadi lebih setara ketika tujuan-tujuan tertentu tercapai, menurut teori ini, yang juga menyatakan bahwa terdapat kurva berbentuk U terbalik (Kuncoro, 2003).

Kurva Kuznets dapat diturunkan dari dinamika pertumbuhan berkelanjutan dari transisi sebuah negara dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, yang dimulai dengan perluasan sektor modern. Menurut Kuznets (1995), distribusi pendapatan akan tumbuh tidak merata seiring dengan berjalannya pembangunan. Kami akan terus melakukan ini hingga jaraknya melebar hingga maksimal. Dalam jangka panjang, kesenjangan pendapatan akan mengecil jika proses pembangunan terus dilakukan.

Koefisien Gini



kurva

kuznets

Sumber : Tordaro dan Smith, 2009

Gambar 2.1 Kurva Kuznets

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1, terdapat korelasi yang jelas antara pendapatan per kapita dan disparitas distribusi kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata jika garisnya semakin cekung, begitu pula sebaliknya, semakin landai maka distribusinya semakin merata. Menurut teori Kuznets, disparitas pendapatan memang naik dan turun dalam fase yang berbeda-beda, meskipun hal ini berbeda-beda tergantung perkembangan masing-masing daerah (Todaro dan Smith, 2009).

1. Ukuran Disparitas

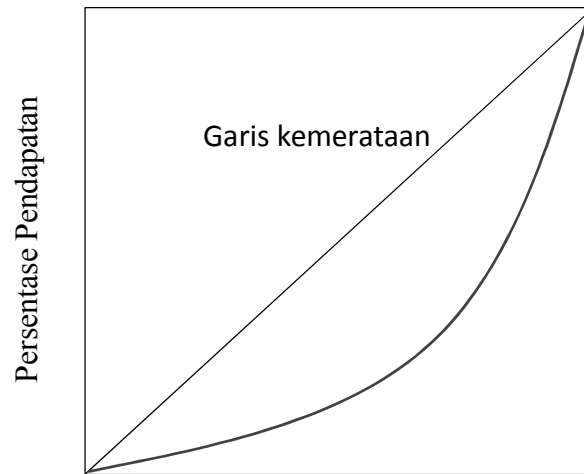
a. Size Distribution

Untuk mengetahui berapa banyak uang yang dimiliki setiap orang atau rumah tangga, para ekonom biasanya menggunakan ukuran pembagian. Untuk mengetahui perbedaan ukuran distribusi, seseorang biasanya harus mengetahui berapa persen pendapatan yang diperoleh dari empat puluh persen masyarakat paling miskin. Menghitung disparitas pendapatan antara 20% penduduk terkaya dan termiskin akan menunjukkan seberapa besar perbedaan yang ada (Soebagyo, 2016).

b Kurva Lorenz

Dari pengkajian tentang Kurva Lorenz, Conrad Lorenz menggambarkan sumbu vertikal untuk perolehan pendapatan dan perbandingan relatif yang dikumpulkan, dan sumbu horizontal untuk pendapatan yang sudah dikelompokkan dalam percentiles. Gambar 2.2 menunjukkan

kurva Lorenz.



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Persentase penduduk

Total pendapatan penduduk yang diterima ditampilkan pada sumbu vertikal pada Gambar 2.2, sedangkan pendapatan penduduk yang diterima sebagai proporsi terhadap total ditampilkan pada sumbu horizontal.

Persentase penerima manfaat pada setiap titik ditunjukkan dengan garis diagonal. Berdasarkan kurva Lorenz, distribusi pendapatan akan lebih merata jika distribusi pendapatan lebih dekat ke diagonal, dan akan lebih tidak merata dan tidak merata jika distribusi pendapatan lebih jauh dari diagonal. Distribusi pendapatan nasional dari waktu ke waktu di antara penduduk diwakili oleh kurva Lorenz. Dengan sisi datar menandakan jumlah kumulatif penduduk dan sisi tegak menunjukkan proporsi kumulatif pendapatan nasional, kurva ini dimasukkan dalam bentuk persegi. Diagonal persegi adalah tempat letak kurva. Pemerataan kekayaan nasional ditunjukkan oleh kedekatan kurva Lorenz dengan garis diagonal atau lurus. Sebaliknya, kondisi yang lebih buruk dan distribusi pendapatan nasional yang lebih tidak merata dan timpang dikaitkan dengan

kurva Lorenz yang lebih jauh dari diagonalnya (yaitu lebih melengkung) (Arsyad 2010).

c Indeks Gini

Angka pada indeks Gini yang berkisar antara 0 hingga 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan. Jika indeks ini bernilai 1 berarti ketimpangan sangat besar, dan nilai 0 berarti distribusi pendapatan tidak merata sama sekali (Sobagyo, 2016). Untuk menghitung Indeks Gini, gunakan rumus berikut:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^K P_i(Q_i - Q_{i-1})}{K}$$

Keterangan:

G = Indeks Gini

P_i = Presentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

K = Banyak kelas pendapatan nilai

Apabila

$G < 0,3$ = Ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$

= Ketimpangan sedang $G > 0,5$

= Ketimpangan tinggi

2. Penyebab dan Kebijakan Disparitas

Faktor-faktor di bawah ini menurut Sjafrizal (2012) yang menyebabkan terjadinya variasi pendapatan daerah:

1. Ketimpangan sumber daya alam: Karena daerah-daerah tersebut dapat menciptakan komoditas dengan lebih murah dan mudah, daerah-daerah yang mempunyai sumber

daya alam yang lebih banyak dapat membangun perekonomiannya dengan lebih cepat. Produktivitas lebih rendah dan harga lebih tinggi di daerah dengan sumber daya alam terbatas.

2. Variasi karakteristik penduduk; Variasi yang signifikan dalam ciri-ciri populasi berpotensi menimbulkan ketimpangan. Hal ini karena tenaga kerja yang lebih produktif dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi ketika terdapat demografi yang mendukung. Sebaliknya, pola demografi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pekerja dan melambatnya ekspansi ekonomi.

3. Penyebab dan Kebijakan Disparitas

Faktor-faktor di bawah ini menurut Sjafrizal (2012) yang menyebabkan terjadinya variasi pendapatan daerah:

1. Ketimpangan sumber daya alam: Karena daerah-daerah tersebut dapat menciptakan komoditas dengan lebih murah dan mudah, daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak dapat membangun perekonomiannya dengan lebih cepat. Produktivitas lebih rendah dan harga lebih tinggi di daerah dengan sumber daya alam terbatas.
2. Variasi karakteristik penduduk; Variasi yang signifikan dalam ciri-ciri populasi berpotensi menimbulkan ketimpangan. Hal ini karena tenaga kerja yang lebih produktif dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi ketika terdapat demografi yang mendukung. Sebaliknya, pola demografi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pekerja dan melambatnya ekspansi ekonomi.

4. Penyebab dan Kebijakan Disparitas

Faktor-faktor di bawah ini menurut Sjafrizal (2012) yang menyebabkan terjadinya variasi pendapatan daerah:

- 1 Ketimpangan sumber daya alam: Karena daerah-daerah tersebut dapat menciptakan komoditas dengan lebih murah dan mudah, daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak dapat membangun perekonomiannya dengan lebih cepat. Produktivitas lebih rendah dan harga lebih tinggi di daerah dengan sumber daya alam terbatas.
- 2 Variasi karakteristik penduduk; Variasi yang signifikan dalam ciri-ciri populasi berpotensi menimbulkan ketimpangan. Hal ini karena tenaga kerja yang lebih produktif dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi ketika terdapat demografi yang mendukung. Sebaliknya, pola demografi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pekerja dan melambatnya ekspansi ekonomi.
- 3 Distribusi produk dan jasa yang tidak merata. Keadaan ini disebabkan oleh tidak lancarnya transmigrasi dan perdagangan antar kota. Terlalu banyak tenaga kerja di satu tempat yang tidak tersedia di lokasi lain yang sebenarnya membutuhkan pekerjaan karena mobilitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, melebarnya kesenjangan ekonomi regional tidak mengherankan jika terjadi di negara-negara berkembang dengan perdagangan yang tidak stabil.
- 4 Untuk menyebarkan pembangunan ke seluruh wilayah dan menjaga efisiensi perusahaan, diperlukan konsep konsentrasi dan penyebaran. Hal ini akan mendukung inisiatif pembangunan yang adil dengan menciptakan pusat pertumbuhan skala kecil dan menengah.

- 5 Pembagian biaya pembangunan antar daerah. Meningkatnya alokasi investasi pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah-wilayah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi daerah akan lesu. Hal ini akan mempercepat proses penciptaan lebih banyak lapangan kerja.

Setelah mengkaji variabel-variabel yang berkontribusi terhadap kesenjangan regional, diperlukan kebijakan dan inisiatif dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Menurut Sjafrizal (2012), inisiatif dan kebijakan tersebut terdiri dari:

- a. Kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk mendistribusikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi secara adil, termasuk peningkatan pelabuhan, terminal, dan jalan raya untuk mendorong perdagangan antardaerah. Jaringan dan fasilitas komunikasi harus dibangun agar terhindar dari tempat yang berjauhan. Daerah tertinggal dapat memberikan prospek kerja dan membantu proses pembangunan dengan mendorong aktivitas perdagangan dan investasi.
- b. Mempromosikan gerakan impulsif dan relokasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk ke daerah tertinggal dengan bantuan dan fasilitas pemerintah; migrasi spontan adalah perpindahan orang secara bebas dan atas biaya sendiri. Karena hal ini dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja di negara-negara berkembang, hal ini dapat mempercepat pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan kekayaan.
- c. Karena pusat pertumbuhan didasarkan pada konsep konsentrasi dan desentralisasi, maka penciptaan kebijakan dan kegiatan tersebut berpotensi mengurangi kesenjangan antar daerah.
- d. Dengan menggunakan gagasan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah, masyarakat dapat memanfaatkan kemampuan lokalnya untuk mendorong pembangunan

dan menutup kesenjangan ekonomi.

Modal diukur dengan indeks Gini, yang dihitung dengan membagi luas segitiga di bawah diagonal dengan luas antara diagonal dan kurva Lorenz. Dari 0 hingga 1, indeks Gini diukur. Ketimpangan yang tinggi ditandai dengan indeks Gini yang mendekati angka 1, sedangkan ketimpangan yang rendah ditandai dengan indeks yang mendekati angka 0 (Todaro, 2006).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pertumbuhan Manusia mempertimbangkan sejumlah variabel untuk menentukan seberapa sukses pertumbuhan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sejumlah aspek penting dari kualitas hidup digunakan oleh BPS sebagai dasar untuk mengukur hasil pembangunan manusia.

Todaro dan Smith (2009) dengan mengintegrasikan hasil di bidang pendapatan per kapita, kesehatan, dan pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghitung kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk meningkatkan aset masyarakat dan meningkatkan taraf hidup warga, diperlukan dukungan dari sektor kesehatan dan pendidikan.

Intinya, ada empat komponen kunci yang membentuk pembangunan manusia: pemerataan, produktivitas, kesehatan, dan pendidikan. Keempat faktor tersebut meliputi belanja produk nasional bruto per kapita, rata-rata lama pendidikan, angka harapan hidup, dan angka harapan hidup saat lahir. Kemampuan masyarakat untuk berfungsi sebagai agen pembangunan yang efektif menunjukkan bahwa kemajuan manusia akan berhasil jika keempat bidang tersebut ditingkatkan sepenuhnya (Feriyanto, 2014). Indikator-indikator termasuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan digunakan oleh Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur seberapa baik kemajuan pembangunan manusia. Berdasarkan sejumlah aspek penting dari kualitas hidup, BPS

menggunakan konsep ini untuk menilai hasil pembangunan manusia.

Peluang hidup, pengetahuan, dan hidup bermartabat adalah tiga elemen tersebut. Rata-rata dan perkiraan lama pendidikan bagi individu yang berusia di atas 15 tahun, angka harapan hidup saat lahir, dan pengeluaran per kapita pada paritas daya beli merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur kemungkinan dalam kehidupan, pengetahuan, dan kehidupan yang bermartabat.

Adapun komponen indeks pembanguana manusia menurut BPS adalah

a) Angka harapan hidup

Perkiraan umur rata-rata seseorang dinyatakan sebagai harapan hidup saat lahir (AHH).

b) Angka melek huruf

Angka melek huruf mengacu pada persentase penduduk yang, pada usia lima belas tahun ke atas, mampu membaca dan menulis huruf Latin dan tulisan hieroglif lainnya.

c) Rata-rata lam sekolah

Jumlah pendidikan formal yang diperoleh penduduk berusia 15 tahun ke atas disebut rata-rata lama sekolah.

d) Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan

Produk domestik bruto (PDB) riil disesuaikan yang dimodifikasi sesuai dengan rumusnya adalah bagaimana UNDP menghitung standar hidup layak, sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita.

Mudrajad dalam Hantika (2020) menyatakan bahwa “Membandingkan hasil pembangunan manusia antar negara dan wilayah dapat dilakukan dengan bantuan IPM.” Berkenaan dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya, IPM mengukur seberapa sejahtera penduduk suatu wilayah dibandingkan dengan hasil pembangunan. Dengan menggunakan tujuan

akhir berikut ini, indeks pembangunan manusia berupaya menilai setiap negara atau wilayah dalam skala 0 hingga 1.

- a) Angka harapan hidup berfungsi sebagai proksi durasi hidup.
- b) Kemahiran membaca dan menulis orang dewasa dibandingkan dengan rata-rata sekolah untuk menentukan tingkat pengetahuan secara keseluruhan.
- c) Standar hidup pendapatan per kapita sebenarnya, disesuaikan dengan variasi nilai mata uang masing-masing negara.

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Menurut Parkin (2008), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana pendapatan suatu rumah tangga terlalu rendah untuk mampu membeli makanan, tempat tinggal dan pakaian dalam jumlah yang di perlukan.

Kehilangan kesejahteraan didefinisikan sebagai kemiskinan. Pendapatan atau pengeluaran seseorang menentukan kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Umumnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup atau kekurangan akses terhadap sumber daya yang diperlukan agar mencukupi kebutuhan hidup.

Garis kemiskinan, atau jumlah pengeluaran konsumsi bulanan, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan seseorang. Daerah dianggap miskin jika rata-rata pendapatan per kapita bulannya berada di bawah ambang batas kemiskinan federal.

Menurut Nasikun (2005), penyebab dan cara timbulnya kemiskinan antara lain:

“Perspektif ini didasarkan pada teori Malthus, yang berpendapat bahwa pertumbuhan pangan dan populasi meningkat sesuai dengan skalanya dan

ketika permintaan manusia meningkat lebih cepat daripada sumber daya yang ada di bumi, maka kemiskinan akan terjadi.”

Sulit untuk menentukan kelompok kemiskinan tertentu, karena istilah “miskin” memiliki konotasi yang luas. Ada empat jenis kemiskinan menurut Purba, Tobing, dan Hutabarat:

- 1. Ketidakmampuan untuk membayar kebutuhan hiduplah yang menentukan kemiskinan ekstrem, bukan garis kemiskinan. Pakaian, makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan terdaftar sebagai kebutuhan dasar.**
- 2. Kemiskinan kultural adalah masalah perilaku individu atau masyarakat yang didasarkan pada norma-norma budaya, seperti kemalasan, pemborosan, dan kurangnya kreativitas, atau ketidakmampuan untuk memperbaiki kehidupan dengan bantuan dari luar. Istilah "kemiskinan budaya" menggambarkan permasalahan sikap terhadap individu atau kelompok yang berasal dari standar budaya. Contoh sikap tersebut antara lain sikap lamban, boros, dan kurang kreatif, serta tidak mampu melakukan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat meski dengan bantuan dari luar.**
- 3. Gagasan mengenai kemiskinan struktural mengacu pada kemiskinan yang timbul karena terbatasnya akses terhadap sumber daya, yang diakibatkan oleh struktur sosio-kultural dan sosio-politik yang sering kali hanya memperparah kemiskinan dan bukannya membantu mengentaskannya.**

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah, retribusi, pajak, dan hasil pengelolaan kekayaan individu. Selain meminta pendanaan untuk implementasi, jalur hukum lain juga digunakan untuk mendapatkan izin di lokasi tertentu. Konsep sentralisasi diwujudkan dalam otonomi daerah.

Menurut Halim (2007), PAD diartikan sebagai pendapatan daerah yang dihasilkan di daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapasitas keuangan merupakan isu penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur keluarga mereka. Tanpa dana yang cukup untuk mendukung pembangunan

dan pelayanan, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan tugasnya. Salah satu metode untuk mengevaluasi kapasitas daerah dari sudut pandang anggaran dan meminimalkan ketergantungan mereka pada pemerintah federal adalah dengan memeriksa distribusi pendapatan daerah yang ada. Merupakan tugas pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana yang berasal dari daerah yang lebih besar dengan lebih baik.

Sebaliknya, ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin tinggi jika komposisi pendapatan asli daerah lebih rendah dibandingkan pendapatan daerah. Sesuai dengan Wahyudi (2010), kebutuhan akan PAD yang lebih besar semakin meningkat seiring dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah karena banyaknya transfer sumber daya manusia, peralatan, uang tunai, dan pencatatan ke provinsi. Membangun infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, jalan, gedung-gedung publik, fasilitas-fasilitas lain yang umumnya dibutuhkan oleh setiap daerah, dan kebutuhan sehari-hari hanyalah beberapa di antaranya dimana peningkatan pendapatan daerah berdampak besar terhadap kelancaran pembangunan berkelanjutan.

Lima faktor utama, termasuk sentralisasi pajak dan ketidakmampuan usaha yang dimiliki atau dioperasikan oleh daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, disebutkan oleh Kuncoro (2004) sebagai penyebab utama rendahnya pendapatan daerah dan, pada akhirnya, ketergantungan pada pemerintah federal. Menurut Halim (2012), ada empat kelompok pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan daerah pertama. Ini adalah:

1. Pajak Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis;

- a) Pajak provinsi
- b) Pajak kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari penilaian berasal dari pajak daerah. Pemerintah negara bagian, distrik, dan lokal dapat mengenakan salah satu dari tiga jenis pajak daerah.

Retribusi Jasa Umum

Pemerintah kota dapat mengenakan pungutan layanan publik pada orang atau organisasi untuk mendanai layanan yang melayani kepentingan dan manfaat publik.

a) Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip bisnis dikenakan biaya layanan bisnis.

b) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada orang atau kelompok dalam rangka mengatur dan mengawasi pemanfaatan wilayah tertentu, sumber daya alam, hasil pertanian, prasarana, dan sarana dalam rangka menjaga lingkungan hidup dan kepentingan umum.

3. Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Dimiliki Secara Mandiri Yang

diperoleh daerah dari usaha tersebut merupakan hasil pengelolaan harta kekayaan yang dikuasai tersendiri oleh daerah yang berbeda. Objek pendapatan, yang terdiri dari kategori jenis pendapatan berikut:

- a. Bagian laba dari partisipasi modal dalam perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Persentase keuntungan dari investasi modal di BUMN atau perusahaan milik negara; dan

- c. Persentase keuntungan dari investasi modal di perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. tambahan PAD yang sah. Pendapatan tambahan berasal dari sumber milik pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan daerah menjadi tujuan penataan ini. Di antara beberapa bentuk pendapatan adalah:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa Rekening Giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Persetujuan permohonan kompensasi daerah
 - e. Menerima komisi, potongan harga, atau pembayaran lain sebagai akibat penjualan atau pembelian barang dan jasa di suatu daerah
 - f. Pendapatan dari variasi nilai rupiah terhadap mata uang lain
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
 - h. Pendapatan dari denda perpajakan;
 - i. Penerimaan denda retribusi;
 - j. Pendapatan dari eksekusi agunan;
 - k. Pendapatan dari pengembalian;
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - m. Pendapatan dari pengajaran dan pelatihan;
 - n. Pendapatan dari penjualan angsuran;
 - o. Hasil pengelolaan dana bergilir

2.2 Hubungan Teoritis Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Disparitas

Pendapatan

Ketika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah mampu meningkatkan HDI (standar hidup masyarakat), sebagaimana dikemukakan oleh Hartini (2015), maka daerah tersebut dianggap berhasil berkembang secara ekonomi. Produktivitas penduduk dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya IPM; produktivitas yang lebih baik menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan produktivitas yang lebih rendah menyebabkan pendapatan yang lebih rendah. Salah satu penyebab kesenjangan pendapatan antar daerah adalah kenyataan bahwa setiap daerah mempunyai IPM yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadi perhatian. Mengukur kinerja manusia di sejumlah domain kualitas hidup, termasuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, adalah Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Becker dalam Hartini (2017) menyatakan bahwa dalam kaitan antara HDI dan kesenjangan pendapatan, pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja berkorelasi dengan tingkat pendidikan formal, menurut teori sumber daya manusia, yang juga menyatakan bahwa pendidikan dapat mempersempit kesenjangan pendapatan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan tingkat pendidikan akan menyebabkan peningkatan gaji bagi semua orang, yang secara langsung atau tidak langsung akan memperburuk kesenjangan ekonomi atau menutup kesenjangan tersebut.

Namun, jika peningkatan pencapaian pendidikan mengakibatkan kesenjangan kekayaan semakin lebar, hal ini mungkin disebabkan karena pertumbuhan penduduk masih terpusat di perkotaan. Dengan kata lain, meningkatnya pencapaian pendidikan dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Menurut Bernanke dan Frank (2007), modal manusia dapat mempengaruhi tingkat produksi seseorang. Ini mencakup hal-hal seperti pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif.

2.2.2 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Disparitas Pendapatan

Tingkat kemiskinan adalah metrik yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan. Porsi penduduk yang mempunyai keluarga dengan pendapatan minimum absolut yang disebut garis kemiskinan disebut angka kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan oleh pemerintah dan dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan jumlah keluarga dan perubahan tingkat harga.

Penyakit ekonomi yang dikenal sebagai kemiskinan, menurut Mankiw (2013), menyerang banyak negara, namun tidak merata. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan mendasarnya makanan dan non-makanan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka ia dikatakan berada dalam kemiskinan. Terdapat hubungan antara derajat kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan diakibatkan oleh adanya kesenjangan dalam suatu masyarakat, dimana sebagian masyarakat tidak mampu menikmati pendapatannya sedangkan sebagian lainnya hanya menerima sebagian kecil saja (Andiny & Mandasari, 2017). Bagi orang-orang tertentu, terdapat perbedaan yang bahkan tak terkira. Terdapat hubungan terbalik antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan: ketika kemiskinan meningkat, maka perbedaan pendapatan juga meningkat.

2.2.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Disparitas Pendapatan

Untuk memberikan pendanaan dan pendapatan kepada pemerintah daerah, pendapatan daerah sangatlah penting. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pendapatan asli daerah dijadikan

sebagai standar. Tujuannya adalah agar kesenjangan pembangunan yang semakin besar antar wilayah dapat dikurangi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun masing-masing daerah mendapat manfaat dari peningkatan pendapatan awal, kesenjangan tetap terjadi di setiap lokasi.

Keseimbangan yang mampu menyeimbangkan kapasitas fiskal daerah dan menurunkan derajat disparitas yang ada saat ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan. Untuk menyediakan fasilitas yang dapat diakses publik yang digunakan secara lokal dan untuk membantu setiap daerah mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan ialah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata (Fauza,2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Studi dari masa lalu diperlukan untuk menyempurnakan temuan studi dan menyegarkan data serta percakapan sepanjang era penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Wardhana, I. N. (2021)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Disparitas	Metode regresi data panel dengan menggunakan	Menggunakan model dengan efek tetap merupakan pilihan terbaik, berdasarkan hasil
		Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	E-views 9	regresi penelitian. Pendapatan Asli Daerah mempunyai dampak negatif yang kecil terhadap Rasio Gini, namun Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

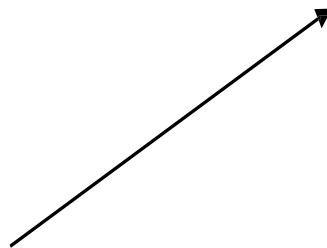
				mempunyai dampak menguntungkan yang besar.
2	Ilham, F. (2023)	Analisis Faktor yang mempengaruhi Disparitas Pendapatan antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2010-2018.	Metode regresi data panel dengan bantuan <i>Software Eviews 9</i>	Berdasarkan temuan penelitian, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB) mempunyai dampak yang besar terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat antara tahun 2010 dan 2018. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pengangguran terbuka mempunyai dampak yang tidak signifikan dan berdampak buruk terhadap kesenjangan pendapatan. ketimpangan pendapatan.
3	Aminah, S. (2017).	Analisis Disparitas Pendapatan antar Wilayah di Provinsi Jambi	Model regresi linear	Berdasarkan data regional, terlihat rata-rata laju pertumbuhan PDB antara tahun 2011 dan 2015 berfluktuasi sebesar 6,79%. Pada saat itu, wilayah Sarolangun mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,43%. Rata-rata indeks ketimpangan Provinsi Jambi di beberapa

				wilayahnya,yang ditentukan dengan teknik Entropi, adalah sebesar 0,426 antara tahun 2011 hingga 2015. Indeks ketimpangan ditunjukkan dengan nilai tersebut.
4	Mubarak, H (2017)	Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan Mamminasata	Tipologi Klassen dan Indeks Williamson.	Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan regional di wilayah Mamminasata meningkat dengan tingkat yang cukup tinggi, dan analisis tipologi Klassen mengenai wilayah tersebut mengklasifikasikan wilayah tersebut sebagai wilayah maju namun terbelakang dan relatif terbelakang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gagasan yang dikemukakan dan dihubungkan dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka kerangka berpikir teoritis adalah suatu pola berpikir teoritis. Kerangka berpikir yang tergambar pada Gambar 2.3 memberikan penjelasan mengenai alasan penelitian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan menggunakan sampel setiap kabupaten dan kota di 33 provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan IPM, garis kemiskinan, dan pendapatan per kapita sebagai variabel independen dan ketimpangan pendapatan (disebut juga kesenjangan pendapatan) sebagai variabel dependen. IPM merupakan indikator yang mempengaruhi garis kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi IPM, dan pendapatan per kapita merupakan variabel yang menjelaskan sumber pendapatan di suatu daerah.

Disparitas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

2.5 Hipotesis Penelitian

Teori-teori yang telah dibahas dan penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan bagi teori-teori yang telah dikembangkan berikut ini:

- a. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
- b. Diduga tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap Disparitas pendapatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
- c. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Disparitas pendapatan

Sumatera Utara tahun 2010-2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan provinsi antara tahun 2010 dan 2021, maka ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data dari cross section dan time series digabungkan untuk menghasilkan data panel, yang digunakan untuk penelitian kuantitatif. Data cross-section mencakup 33 kabupaten dan kota, dan data time series berisi data Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 hingga 2021. Data yang diolah atau dikumpulkan secara tidak langsung disebut data sekunder. Penelitian dan laporan dari berbagai organisasi termasuk Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan termasuk di dalamnya. Data panel adalah kompilasi cermat atas informasi individu yang dikumpulkan dalam jangka waktu lama.

3.3 Analisis Data

3.3.1 Model Regresi Data Panel

Disebut juga kumpulan data, analisis data panel merupakan rangkaian waktu dan penampang yang digabungkan di dalamnya. Meskipun data dalam penampang terdiri dari suatu item tetapi juga memerlukan subobjek tambahan yang terhubung atau relevan, data dalam deret waktu terdiri dari satu objek dalam beberapa periode waktu, seperti harian, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Ada banyak model penelitian yang dapat digunakan untuk mengestimasi model data

panel, seperti *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

3.3.2 Common Effect Model (CEM) atau Pooled Regression Model

Dengan menggabungkan data deret waktu dan data cross-section secara sederhana, Common Effect Model adalah teknik model data panel yang paling mudah. Dipercayai bahwa perilaku data perusahaan tetap konstan sepanjang interval waktu karena model ini mengabaikan variabel individual dan temporal. Model data panel dapat diestimasi menggunakan metode ini baik dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) atau teknik Least Squares: (Basuki & Prawoto, 2016)

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}; t = 1, 2, 3, \dots, T; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Keterangan:

Y_{it} = Gini Ratio pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

X_1 = Indeks Pendapatan Manusia pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

X_2 = Kemiskinan pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

X_3 = Pendapatan asli daerah pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

α = Intersep dari model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien variabel independen

u_{it} = Galat atau *error term* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

3.3.3 Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan pendekatan ini, variasi intersep dapat menjelaskan perbedaan individual. Kita dapat menentukan variasi intersep antar organisasi dengan memperkirakan data panel model Efek Tetap menggunakan pendekatan variabel dummy. Perbedaan budaya kerja, insentif, dan cara manajemen dapat menyebabkan perbedaan ini. Namun, sloponya tidak berbeda antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV) (Basuki & Prawoto, 2016).

Model peubah *Dummy* adalah sebagai berikut: $Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it}$

+ u_{it}

$$Y = f(X, D_2, D_3, D_4, \dots, D_{33})$$

Dimana :

Y_{it} = Gini Ratio

X_1 = Indeks Pembangunan Manusia

X_2 = Kemiskinan

X_3 = Pendapatam Asli Daerah

i = Unit *cross section*

t = Unit time series

α = Kontanta

α = Intersep dari model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = *Slope* atau koefisien variable independen

u_{it} = Galat atau error terhadap unit observasi ke- i dan waktu

ke- t

D = *Dummy*

Adapun akibat penggunaan dari *Fixed Effect Model*, atau model *LSDV* yaitu:

- a. Kemungkinan besar akan kehilangan banyak derajat bebas jika menggunakan banyak perubah..
- b. Multikolinearitas mungkin terjadi dengan banyak variabel.
- c. Harus memperhatikan dengan hati-hati galat u_{it} pada asumsi bahwa $u_{it} \sim N(0, \sigma^2)$.

3.3.4 Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Tidak dapat disangkal bahwa model transisi dengan efek tetap mempunyai penerapan. Jumlah derajat kebebasan akan diturunkan dengan menambahkan mean dari variabel ini, yang pada akhirnya akan menurunkan kemanjuran estimasi. Teknik model efek acak (efek tetap) atau model komponen kesalahan dapat digunakan untuk menganalisis model data panel yang mencakup korelasi antar istilah kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan temporal yang dihasilkan dari observasi. Teknik estimasi model efek acak dalam hal ini menggunakan variabel perancu atau kata kesalahan seperti korelasi antara waktu dan komponen.

Faktor perancu mungkin berkorelasi dari waktu ke waktu dan antar orang dalam data panel yang diperkirakan model ini. Komponen kesalahan dimasukkan untuk setiap perusahaan dalam model efek acak untuk memperhitungkan perbedaan dalam intersep. Heteroskedastisitas dapat dihindari dengan menggunakan model efek acak. Beberapa nama model ini antara lain pendekatan

Generalized Least Square (GLS) atau Error Component Model (ECM). Berikut ilustrasi persamaan REM (Basuki & Prawoto, 2016) :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}; t = 1, 2, 3, \dots, T; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Keterangan :

Y_{it} = Gini Ratio pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

X_1 = Indeks Pembangunan Manusia pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

X_2 = Kemiskinan pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

X_3 = Pendapatan Asli Daerah pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

i = Unit *cross section*

t = Unit *time series*

α = Konstanta

α = Intersep dari model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = *Slope* atau koefisien variabel independen

u_{it} = Galat atau *error* term pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

3.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.4.1 Uji Chow

Di antara Fixed Effect Model dan Common Effect Model, uji Chow berupaya mengidentifikasi model mana yang lebih unggul. Model Efek Tetap adalah model yang paling tepat untuk digunakan jika temuannya menunjukkan bahwa model tersebut adalah model terbaik untuk diterapkan jika hipotesis nol diterima. Penggunaan Model Efek Tetap disarankan jika data menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Setelah itu akan dilakukan Hausman Test.

Menemukan model terbaik untuk digunakan saat mengestimasi data panel dilakukan dengan menggunakan uji Chow, yang membandingkan model Common Effect dan Fixed Effect. Per Basuki dan Prawoto (2016), berikut hipotesis dalam uji Chow:

H_0 = Model *common* Effect lebih baik dari pada Fixed Effects Model H_1 = Model *Fixed* Effects lebih baik dari pada Common

Kriteria:

H_0 diterima apabila $p\text{-value} > \alpha$

H_1 diterima apabila $p\text{-value} \leq \alpha$

3.4.2 Uji Hausman

Baik model efek tetap maupun model efek acak dipilih menggunakan pengujian ini (Fixed Effect Model). Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah kesalahan gabungan model, atau kesalahan, dan satu atau lebih variabel penjelas, atau independen, berkorelasi.

Disarankan untuk mengadopsi model Random Effect jika temuan Uji Hausman menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima. Sebaliknya, model Efek Tetap bekerja paling baik jika data menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Pertama, dihipotesiskan bahwa tidak ada hubungan antara variabel penjelas dan kesalahan model. Asumsi bahwa terdapat lebih banyak kategori cross-sectional daripada variabel independen yang dimasukkan dalam model sebagai konstanta diperlukan untuk menghitung statistik Uji Hausman. Selain itu, model mungkin tidak selalu bisa mendapatkan estimasi varians penampang positif, yang diperlukan untuk penghitungan statistik Uji Hausman. Satu-satunya model yang dapat diterapkan jika persyaratan ini tidak terpenuhi adalah model Fixed Effect. Namun demikian, Uji Hausman tidak perlu dilakukan jika hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model Common Effect adalah yang terbaik.

3.5 Pengujian kriteria statistik

Pengujian yang bermakna didasarkan pada uji statistik terhadap distribusi sampel statistik di bawah hipotesis nol dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol sampel itu benar atau tidak. Hasil uji statistik dari data yang tersedia digunakan untuk menentukan perlu tidaknya mengolah H_0 . Jenis uji statistik yang tersedia antara lain koefisien regresi parsial (uji t), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan uji determinasi (R^2).

3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Sejauh mana suatu model dapat memperhitungkan fluktuasi variabel dependen pada dasarnya diukur dengan koefisien determinasi (R^2). Kisaran nilai R^2 adalah 0–1. Nilai R^2 yang rendah yaitu mendekati nol menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Jika variabel independen hampir seluruhnya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk

menghasilkan variasi variabel dependen, maka nilainya mendekati 1 (Ghozali, 2011).

Rumus untuk mencari koefisien determinan (R^2) Adalah :

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

Keterangan:

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi

JKT = Jumlah Kuadrat Total

Menambahkan terlalu banyak variabel independen ke dalam model merupakan masalah besar ketika menggunakan koefisien determinasi. Setiap penambahan suatu variabel niscaya akan mengakibatkan peningkatan, terlepas dari apakah hal tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam menentukan model regresi yang optimal, beberapa peneliti menyarankan untuk menampilkan nilai Adjusted R².

3.5.3 Uji simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen secara kolektif mempengaruhi variabel dependen, Ghozali (2018) menyatakan digunakan uji F. Setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F_{tabel} > F_{hitung}$.

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR (k - 1)}{JKG (n - k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

K: Banyaknya koefisien regresi

N: Banyaknya Sampel

Pada tingkat signifikansi 5% kriteria pengujian digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel bebas secara serentak atau bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel bebas secara serentak atau bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4 Uji secara individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan, menurut Ghazali (2018), untuk memastikan seberapa baik masing-masing variabel independen mampu menjelaskan perilaku variabel dependennya sendiri (secara parsial).

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i - \beta_i}{S(\beta_i)} ; i = 1, 2, 3$$

β_i = koefisien regresi

β_i = parameter

$S(\hat{\beta}_i)$ = simpangan baku Hipotesis yang digunakan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh IPM terhadap Gini Ratio

$H_1 : \beta_1 < 0$ ada pengaruh positif dan signifikan IPM terhadap Gini Ratio

2. Tingkat Kemiskinan

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh kemiskinan terhadap Gini Ratio

$H_1 : \beta_2 > 0$ ada pengaruh positif dan signifikan kemiskinan terhadap Gini Ratio

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$H_0 : \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh PAD terhadap Gini Ratio

$H_1 : \beta_3 < 0$ ada pengaruh positif PAD terhadap Gini Ratio

3.6 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.6.1 Deteksi Multikolinearitas

Jika seluruh atau sebagian besar variabel yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai hubungan linier atau korelasi yang sempurna atau jelas di antara variabel-variabel tersebut, maka dikatakan multilinear. Pada kenyataannya, adanya beberapa hubungan linier disebut sebagai “multikolinearitas”. Multikolinearitas terjadi pada kedua situasi, namun perbedaan ini jarang terlihat dalam kenyataan. Indikasi adanya multikolinearitas penelitian ini adalah matriks koefisien antar masing-masing variabel independen. Ada dua faktor yang membuat perilaku konvergen menjadi sangat berbahaya. Meskipun demikian, informasi mengenai hubungan rumit dengan tiga variabel atau lebih tidak ditingkatkan dengan korelasi berpasangan ini.

3.6.2 Deteksi Normalitas

Apakah error (residual res_1) pada model regresi berdistribusi normal dapat dipastikan dengan melakukan uji normalitas. Nilai kesalahan menunjukkan distribusi normal, seperti yang ditunjukkan oleh uji t dan F. Asumsi ini harus dipenuhi agar uji statistik pada sampel kecil dianggap tidak valid. Dengan menggunakan analisis grafis dan statistik, seseorang dapat menentukan apakah kesalahan didistribusikan dengan benar atau tidak.

3.6.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara residu pada setiap observasi dengan model regresi. Heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana suatu variabel pengganggu bervariasi secara berbeda untuk setiap observasi. Kuadrat terkecil panel, atau PLS, digunakan oleh penduga karena heteroskedastisitas. Panel kuadrat terkecil pada aplikasi Eviews 12 dapat digunakan untuk menilai ada tidaknya heteroskedastisitas. Untuk setiap perilaku dalam persamaan simultan, hasil regresi diperiksa menggunakan teknik persamaan dan PLS. Hasil yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah nilai signifikansi (probabilitas) dari tabel uji heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikan (probabilitas) melebihi 0,05 maka model tidak heteroskedastis. Sebaliknya, hal ini terjadi jika probabilitas nilai signifikannya kurang dari 0,05.

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Disparitas pendapatan adalah ketidaksamaan dalam pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah yang menyebabkan ketidaksamaan tingkat pendapatan per kapita antar penduduknya atau ketidaksamaan pendapatan yang terjadi ketika pendapatan setiap orang tidak merata.
2. Indeks Pembangunan Manusia adalah alat untuk mengukur perbandingan pencapaian berbagai aspek penting dari kualitas hidup manusia. Ini termasuk pendidikan, kesehatan, pendapatan, melek huruf, standar hidup, dan harapan hidup.
3. Jumlah uang atau aset non-materi biasanya diperhitungkan ketika menentukan tingkat kemiskinan dari sudut pandang ekonomi. Mengumpulkan jumlah individu yang hidup

di bawah garis kemiskinan akan menghasilkan tingkat kemiskinan. Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

4. Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengolahan kekayaan daerah tertentu, pungutan daerah dari badan usaha yang beroperasi di daerahnya, dan pendapatan asli daerah lainnya dari nilai kekayaan bersihnya.

